SKRIPSI

FUNGSI KOORDINASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI RUAS JALAN DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

Yudi Akbar
NIM. E1032201040

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

SKRIPSI

FUNGSI KOORDINASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI RUAS JALAN DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

Yudi Akbar
NIM. E1032201040

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

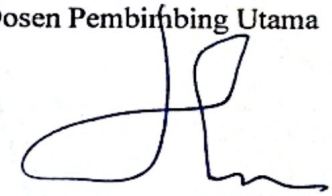
FUNGSI KOORDINASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI RUAS JALAN DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA

Tanggung Jawab Yuridis:

Yudi Akbar
NIM. E1032201040

Disetujui Oleh:

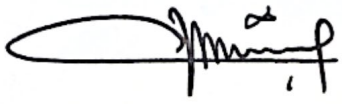
Dosen Pembimbing Utama



Martinus, S.Sos., M.Si.
NIP. 197212272006041002

Tanggal : 1-2-2026

Dosen Pembimbing Pendamping



Hairil Anwar, SE, M.Si
NIP. 196905142007011004

Tanggal : 15-3-2026

Dipindai dengan CamScanner

FUNGSI KOORDINASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI RUAS JALAN DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA

Oleh:

Yudi Akbar
NIM. E1032201040

Dipertahankan di	: Pontianak
Pada Hari/tanggal	: Rabu, 13 Mei 2026
Waktu	: 10.00 WIB - Selesai
Tempat	: Ruang 1

Tim Penguji:

Ketua

Martinus, S.Sos, M.Si
NIP. 197212272006041002

Sekretaris

Hairil Anwar, SE, M.Si
NIP. 196905142007011004

Penguji Utama

Bima Sujendra, S.IP., M.Si
NIP. 198805072014041002

Penguji Pendamping

Haunan Fachry Rohilie, S.I.P., MA
NIP. 199003182019031010

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, M.Si
NIP. 197205212006041001

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Yudi Akbar (E1032201040): Fungsi Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Ruas Jalan Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kapupaten Kayong Utara. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fungsi koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Handayaningrat (1994) mengenai fungsi koordinasi yang terdiri dari lima indikator: komunikasi, kesadaran akan pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan, komitmen dan insentif, serta kontinuitas perencanaan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan bahan referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator komunikasi, koordinasi internal antarinstansi seperti BAPPEDA dan Dinas PUPR telah berjalan cukup baik, namun komunikasi eksternal dengan masyarakat masih terbatas dan pemanfaatan media digital belum optimal. Pada indikator kesadaran koordinasi, BAPPEDA telah menunjukkan kesadaran yang baik melalui keterlibatan aktif dalam forum Musrenbang, namun belum menyeluruh di seluruh tingkatan pemerintahan. Untuk indikator kompetensi partisipan, SDM di BAPPEDA dan OPD teknis cukup kompeten, tetapi di tingkat kecamatan dan desa masih terdapat kesenjangan kemampuan teknis dan analitis. Pada indikator kesepakatan dan komitmen, koordinasi dilakukan melalui forum formal dan evaluasi tahunan, namun insentif masih minim. Pada indikator kontinuitas perencanaan, dokumentasi dan evaluasi telah dilakukan secara rutin, namun keberlanjutan belum sepenuhnya terjamin karena masih bergantung pada stabilitas struktural dan arah kebijakan. Peneliti menyarankan penguatan komunikasi, peningkatan kapasitas SDM, insentif koordinatif, serta sistem dokumentasi dan evaluasi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Fungsi Koordinasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Perencanaan Pembangunan, Infrastruktur Jalan, Kayong Utara.

ABSTRACT

Yudi Akbar (E1032201040): The Coordinating Function of the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) in Road Infrastructure Development Planning in Rantau Panjang Village, Simpang Hilir District, Kayong Utara Regency. Thesis, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak.

This study aims to describe and analyze the coordinating function of the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) in road infrastructure development planning in Rantau Panjang Village, Simpang Hilir District, Kayong Utara Regency. The study applies Handayaningrat's (1994) theory of coordination, which includes five indicators: communication, awareness of the importance of coordination, participant competence, agreement, commitment and incentives, and planning continuity. This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. Data validity was tested through source and reference triangulation. The results show that for the communication indicator, internal coordination between agencies such as BAPPEDA and the Public Works Department has been quite effective; however, external communication with the public is still limited, and the use of digital media is not optimal. Regarding coordination awareness, BAPPEDA has shown strong awareness through active involvement in Musrenbang forums, although this has not been evenly implemented across all levels of government. For the participant competence indicator, human resources in BAPPEDA and technical agencies are fairly competent, but there is still a gap in technical and analytical skills at the sub-district and village levels. For agreement and commitment, coordination is carried out through formal forums and annual evaluations, but incentives remain minimal. Regarding planning continuity, documentation and evaluation are conducted regularly; however, sustainability is not fully guaranteed due to dependency on structural stability and prevailing policies. The study recommends strengthening communication, improving human resource capacity, providing strategic coordination incentives, and enhancing documentation and evaluation systems to ensure sustainable development planning.

Keywords: Coordination Function, Regional Development Planning Agency (BAPPEDA), Development Planning, Road Infrastructure, Kayong Utara

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Fungsi Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Ruas Jalan Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara.” Judul ini diangkat berdasarkan permasalahan pembangunan infrastruktur jalan yang terjadi di Kabupaten Kayong Utara, khususnya di Kecamatan Simpang Hilir. Permasalahan tersebut antara lain banyaknya jalan yang mengalami kerusakan, yang berdampak pada terganggunya mobilitas masyarakat serta lambatnya pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam hal ini, koordinasi antara BAPPEDA sebagai perencana dan Dinas Pekerjaan Umum sebagai pelaksana teknis dianggap penting untuk sinkronisasi dan efektivitas pembangunan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kayong Utara menghadapi beberapa kendala dalam pembangunan infrastruktur jalan, salah satunya adalah koordinasi yang belum optimal antar instansi, yang menjadi rumusan masalah utama dalam skripsi ini. Selain itu, terdapat tantangan dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, ketidaksesuaian data antarlembaga, serta belum maksimalnya komunikasi dan sinergi antar pihak terkait.

Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi, peneliti menemukan bahwa fungsi koordinasi yang dilakukan oleh BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan jalan masih perlu ditingkatkan. Hambatan-hambatan seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya koordinasi, rendahnya kompetensi partisipan, serta kurangnya komitmen dan kesinambungan dalam proses

perencanaan menjadi faktor penyebab belum optimalnya perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di daerah tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori Handayaningrat (1994) tentang fungsi koordinasi yang terdiri dari lima indikator, yaitu komunikasi, kesadaran koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan, komitmen dan insentif, serta kontinuitas perencanaan. Dalam indikator komunikasi dijelaskan bahwa pentingnya pertukaran informasi antarinstansi untuk menunjang perencanaan. Indikator kesadaran dan kompetensi menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam mendukung kelancaran koordinasi. Sedangkan indikator kesepakatan dan kontinuitas menggarisbawahi perlunya komitmen bersama dan keberlanjutan proses koordinasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai fungsi koordinasi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan subjek penelitian yaitu pejabat BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum, Camat Simpang Hilir, dan masyarakat setempat. Data dianalisis melalui proses reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan bahan referensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi koordinasi yang dijalankan oleh BAPPEDA Kabupaten Kayong Utara dalam perencanaan pembangunan

infrastruktur jalan telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Dalam indikator komunikasi, koordinasi internal dan lintas instansi teknis seperti Dinas PUPR sudah cukup baik, tetapi pemanfaatan teknologi informasi seperti website resmi dan komunikasi dua arah dengan masyarakat masih terbatas. Kesadaran akan pentingnya koordinasi telah tertanam di lingkungan internal BAPPEDA, terlihat dari partisipasi aktif dalam forum perencanaan dan pelibatan dalam Musrenbang di berbagai level. Meski demikian, kompetensi teknis di tingkat kecamatan dan desa masih rendah, sehingga partisipasi mereka lebih bersifat administratif dan kurang substansial. Koordinasi antarinstansi telah difasilitasi melalui forum formal dan mekanisme evaluasi tahunan, tetapi insentif koordinatif yang diberikan masih bersifat nonmateri dan belum cukup memotivasi kolaborasi jangka panjang. Di sisi lain, kontinuitas perencanaan telah dijaga melalui dokumentasi dan evaluasi rutin, namun keberlanjutan pembangunan masih rentan terganggu oleh pergantian pejabat atau perubahan arah kebijakan.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyarankan agar BAPPEDA meningkatkan efektivitas komunikasi melalui penguatan pola komunikasi yang terdokumentasi dan pemanfaatan teknologi informasi, seperti forum daring dan aplikasi berbasis perencanaan. Kesadaran koordinasi perlu diperkuat dengan membangun budaya kerja kolaboratif melalui agenda rutin lintas sektor dan pelibatan aktif antarinstansi. Kompetensi partisipan dapat ditingkatkan melalui pelatihan teknis dan manajerial, serta peningkatan literasi terhadap regulasi dan arah kebijakan pembangunan. Selain itu, diperlukan kesepahaman sejak awal proses perencanaan, pemberian insentif koordinatif yang memadai, serta penguatan

sistem dokumentasi dan evaluasi agar perencanaan infrastruktur berjalan secara berkelanjutan dan tidak terputus meskipun terjadi perubahan struktural di lingkungan pemerintahan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Yudi Akbar

Nomor Induk Mahasiswa : E1032201040

Program Studi : Ilmu Pemerintah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 15 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,



Dipindai dengan CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Lakukan apa pun yang kamu mau dan berusahalah sekuat tenaga. Sebab entah gagal atau berhasil, pada akhirnya gelar hanyalah satu bagian kecil dari perjalanan hidup."

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibu tercinta Unit Saputra dan Hauliah yang telah memberikan segala dukungan, semangat, perhatian serta doa yang tidak pernah putus serta telah mendidik dan membesarkan penulis dalam limpahan kasih sayang. Terimakasih sudah menguatkan penulis disaat merasa putus asa membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis bisa sampai pada tahap skripsi ini selesai. Semoga ayah sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
2. Kedua saudara penulis Devi Aulia dan Alzio Akbar Gifani yang selalu memberikan semangat dan menguatkan penulis disaat merasa lelah dan putus asa. Terima kasih sudah memberikan apapun yang penulis butuhkan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul "Fungsi Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Ruas Jalan Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara". Tujuan dari Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam penyusunan dan penyelesaian Skripsi ini, tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Martinus, S.Sos, M.Si selaku dosen Pembimbing utama dan Bapak Hairil Anwar, SE, M.Si Selaku pembimbing kedua, yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi bagi penulis dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini.
2. Bapak Bima Sujendra, S.IP, M.Si selaku dosen penguji pertama dan Bapak Haunan Fachry Rohilie, S.I.P, M.A selaku dosen penguji kedua yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun, sehingga skripsi ini bisa menjadi lebih baik.
3. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Staff Akademik, dan Administrasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah mendukung sehingga penulis bisa sampai ke tahap penyusunan Skripsi ini.
5. Pihak keluarga, terutama kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, motivasi, dukungan material dan moril.
6. Teman perjalananku Septia yang selalu hadir menemani dan memberikan dukungan moril bagi penulis, menjadi tempat berbagi keluh kesah, serta segala

cerita canda tawa selama proses perkuliahan penulis hingga penyusunan skripsi.

7. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang banyak membantu dalam melancarkan pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa memberikan nilai tambah dan manfaat baik, khususnya bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Pontianak, 15 Mei 2026

Yudi Akbar
NIM. E1032201040

DAFTAR ISI

halaman

LEMBARAN PERSETUJUAN ..... **i**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**

ABSTRAK ..... **iii**

ABSTRACT ..... **iv**

RINGKASAN SKRIPSI ..... **v**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **viii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **ix**

KATA PENGANTAR ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xii**

DAFTAR TABEL ..... **xv**

DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang Penelitian 1

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian 8

1.3. Fokus Penelitian 8

1.4. Rumusan Masalah 9

1.5. Tujuan Penelitian 9

1.6. Manfaat Penelitian 9

1.6.1 Manfaat Teoritis 10

1.6.2 Manfaat Praktis 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**

2.1. Definisi Konsep 11

2.1.1. Fungsi 11

2.1.2. Koordinasi 11

2.1.3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 12
2.1.4. Perencanaan Pembangunan 12
2.1.5. Infrastruktur Jalan 13
2.2. Kajian Teori 14
2.2.1. Fungsi Koordinasi 14
2.2.2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 26
2.2.3. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan 28
2.3. Penelitian yang Relevan 38
2.4. Alur Pikiran Penelitian 41
2.5. Pertanyaan Penelitian 42

BAB III METODE PENELITIAN 43

4.1. Jenis Penelitian 43
4.2. Langkah-Langkah Penelitian 43
4.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 44
4.4. Subjek dan Objek Penelitian 45
4.5. Teknik Pengumpulan Data 46
4.6. Instrumen Pengumpulan Data 47
4.7. Analisa Data 48
3.7.1. Teknik Analisis Data 49
3.7.2. Uji Keabsahan 50

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 53

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Kayong Utara 53
4.1.1. Geografis Kabupaten Kayong Utara 53
4.1.2. Topografi dan Iklim 55
4.1.3. Keadaan Penduduk 57
4.2. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara 58
4.2.1. Profil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara 58

4.2.2. Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara 59
4.2.3. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara 61
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 67
2.1. Hasil Penelitian 67
2.2. Pembahasan 69
2.2.1. Komunikasi 69
2.2.2. Kesadaran akan pentingnya Koordinasi 73
2.2.3. Kompetensi Partisipasi 77
2.2.4. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi 80
2.2.5. Kontuinitas Perencanaan 84
BAB VI PENUTUP 88
6.1 Kesimpulan 88
6.2 Saran 89
6.3 Keterbatasan Penelitian 91
DAFTAR PUSTAKA 93
LAMPIRAN 98

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*

1.1 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi di Kabupaten Kayong Utara (Km) Tahun 2021-2023 4

2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian ini 40

3.1 Waktu Penelitian 45

4.1 Data Penduduk Kabupaten Kayong Utara Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024 58

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

1.1 Kondisi Jalan Di Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara 4

2.1 Alur Pikir Penelitian Ini 41

4.1 Peta Kabupaten Kayong Utara 54

4.2 Peta Kecamatan Simpang Hilir 55

4.3 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kayong Utara 62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran *halaman*

1. Kisi-Kisi Panduan Wawancara 98
2. Pedoman Wawancara 100
3. Transkip Wawancara 108
4. Pedoman Observasi 124
5. Dokumen Musrenbang 125
6. Dokumen Usulan Perbaikan Jalan 126
7. Dokumen Rencana Strategis Perubahan Dinas PUPR 2019-2023 127
8. Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian 128
9. Surat Balasan Penelitian 129
10. Daftar Riwayat Hidup 130

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perencanaan dan pembangunan seperti tubuh yang tak terpisahkan, di mana organ-organ saling terhubung; pembangunan memerlukan perencanaan, sedangkan perencanaan harus direalisasikan dalam pembangunan, dari tingkat pusat hingga daerah (Putri 2017, 1). Dalam struktur pemerintahan pusat dikenal dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan dalam struktur pemerintahan daerah pada umumnya disebut dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa BAPPENAS merupakan Lembaga Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dipimpin oleh Kepala. BAPPENAS melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Menurut UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Adapun dalam suatu pemerintahan daerah perencanaan ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Hal ini, memperkuat legitimasi BAPPEDA sebagai institusi perencanaan daerah yang berperan penting dalam menciptakan sistem perencanaan yang efektif dan bertanggung jawab.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan, penendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPPEDA adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Menurut Rion (2022, 243) BAPPEDA adalah badan yang bertanggung jawab merencanakan pembangunan di setiap Kabupaten/Kota dengan tugas pokok dan fungsi khusus.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan menentukan kebijakan serta program pembangunan di wilayahnya. Berdasarkan Peraturan Bupati Kayong Utara nomor 52 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi jabatan pada badan perencanaan pembangunan daerah bahwa tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diantaranya adalah melakukan Perumusan kebijakan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah; melakukan Pelaksanaan bimbingan, koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah; Melakukan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah; dan melakukan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salah satu tugas utama BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) adalah merencanakan dan mengoordinasikan pembangunan di bidang sarana dan prasarana, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur.

Koordinasi merupakan unsur penting dalam setiap organisasi, terutama dalam birokrasi pemerintah, karena adanya pembagian tugas dan spesialisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui koordinasi yang baik, BAPPEDA dapat memastikan semua unit organisasi di daerah bekerja selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Fungsi Koordinasi sebagai bagian dari tugas BAPPEDA harus melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam proses perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam pembangunan infrastruktur. Kerja sama yang baik antara perangkat daerah, masyarakat, dan dinas terkait diperlukan untuk memastikan kesuksesan pembangunan ini.

Salah satu infrastruktur penting dalam pembangunan yang berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi adalah infrastruktur jalan. Pembangunan infrastruktur jalan yang memadai menjadi salah satu kunci dalam mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mempercepat pengembangan ekonomi dan sosial di daerah-daerah terpencil.

Kabupaten Kayong Utara merupakan satu diantara Kabupaten yang memiliki kondisi jalan rusak. Berdasarkan hasil observasi awal pada bulan Juni 2024 ditemukan jalan dengan kondisi rusak dibeberapa kecamatan di Kabupaten Kayong Utara, satu diantaranya di Kecamatan Simpang Hilir Desa Rantau Panjang. Hal ini bisa dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1

Kondisi Jalan di Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir

Kabupaten Kayong Utara



Sumber: Penulis 2024

Selain itu, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kayong Utara update Februari tahun 2024 juga memaparkan data sebagai berikut:

Tabel 1.1

Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi di Kabupaten Kayong Utara (Km) Tahun 2021-2023

Kondisi Jalan	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi di Kabupaten Kayong Utara (Km)		
	2021	2022	2023
Baik	135,82	135,82	65,88
Sedang	39,26	39,26	110,55
Rusak Ringan	26,78	26,78	26,20
Rusak Berat	98,74	98,74	97,97
Jumlah	300.60	300.60	300.60

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara

Berdasarkan tabel diatas, ditemukan bahwa Kabupaten Kayong Utara memiliki jalan sepanjang 300,60 Km dengan terdapat 4 kategori kondisi jalan yakni kondisi baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Di tahun 2021-2022 kondisi jalan rusak tetap sama lalu tahun 2023 kondisi jalan dengan kondisi baik semakin berkurang.

Berdasarkan dokumentasi kondisi lapangan dan data pemantauan infrastruktur daerah, ruas jalan poros utama yang melintasi Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, mengalami kerusakan yang cukup parah. Jalan tersebut memiliki lebar perkerasan efektif sekitar 4,5 hingga 5,5 meter, namun pada beberapa titik kerusakan berat, kondisi jalan yang dipenuhi lubang dan hamparan kerikil tajam telah menguasai sekitar 70% hingga 100% dari keseluruhan badan jalan atau hampir mencapai ±5 meter lebar jalan. Kerusakan ini menyebabkan pengendara kendaraan roda dua maupun roda empat tidak memiliki ruang jalan yang aman untuk menghindari lubang sehingga kendaraan harus bergerak sangat lambat dan meningkatkan risiko kecelakaan, terutama tergelincir akibat material kerikil lepas. Jalan yang rusak atau belum dibangun dengan baik mempengaruhi akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar dan ekonomi, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dari pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah ini melalui perencanaan pembangunan yang baik.

Sebagai badan perencana, BAPPEDA bertanggung jawab dalam mengoordinasikan proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh berbagai perangkat daerah, seperti dinas-dinas, lembaga teknis, kecamatan, dan

pemerintahan desa. Tujuan koordinasi ini adalah agar setiap perangkat daerah dapat bekerja sama dengan baik, fokus pada kemajuan daerah, dan menghindari tumpang tindih pekerjaan, terutama di bidang pembangunan. Dengan demikian, pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Koordinasi antara Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) sebagai pelaksana teknis pembangunan sangatlah penting agar terjadi sinkronisasi antara rencana yang disusun dan implementasi di lapangan. Dalam hal ini, koordinasi antara Bapperida dan Dinas PUPR Kabupaten Kayong Utara secara yuridis formal berlandaskan pada Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2024. Regulasi ini menegaskan kedudukan Bapperida sebagai unsur penunjang dalam mengoordinasikan, mengendalikan, dan menyelaraskan perencanaan teknis sektoral, termasuk dari Dinas PUPR, agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Koordinasi ini menjadi sangat krusial mengingat sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang ini, diatur bahwa perencanaan pembangunan harus mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin integrasi dan sinergi antardaerah, serta memastikan penggunaan sumber daya yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa hingga nasional menjadi forum penting untuk merumuskan rencana pembangunan yang komprehensif dan partisipatif.

Pentingnya koordinasi antara Bappeda dan Dinas PUTR di Kabupaten Kayong Utara menjadi semakin nyata mengingat tantangan yang dihadapi dalam

pembangunan jalan di Kecamatan Simpang Hilir Desa Rantau Panjang. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah tersebut dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam hal peningkatan aksesibilitas, kesejahteraan, dan pengembangan ekonomi lokal.

Beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian dari Nona Majore, Welson Yappi Rompas & Rully Mambo (2017) membahas tentang Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud hasil penelitian menyatakan bahwa Koordinasi perencanaan pembangunan jalan kabupaten di Kecamatan Salibabu berjalan tertib dan lancar sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Instansi terkait seperti Dinas PUTR, Bappeda, dan Camat berkoordinasi dengan baik sehingga program pembangunan jalan kabupaten dapat disusun berdasarkan skala prioritas. Mekanisme koordinasi tersebut dilaksanakan mulai dari tingkat bawah. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah (Dinas PUTR, Camat, dan Kepala Desa) dalam pelaksanaan program pembangunan jalan di Kecamatan Salibabu juga berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian penelitian dari Rio Surya Pratama (2019) yang membahas tentang Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur dengan hasil penelitian Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Kutai Timur telah menjalankan tugasnya sebagai perencana dan pelaksana pembangunan jalan dengan cukup baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2013. Dinas ini

bertanggung jawab dalam mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah melalui koordinasi vertikal dan horizontal dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk badan, dinas, kantor, dan kecamatan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan seperti ketidakmerataan sumber daya manusia, seringnya keterlambatan dalam pengumpulan data, serta ketidakseragaman data antar SKPD yang menyebabkan kesulitan bagi Dinas Pekerjaan Umum dalam menyusun program pembangunan yang akan datang. Penelitian dari Yuri Agustiani (2020) yang membahas tentang Fungsi koordinasi bappeda dalam Perencanaan Pembangunan Pendidikan Di Kabupaten Aceh Tengah dengan hasil penelitian fungsi koordinasi Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah telah berjalan baik namun belum optimal. Masih terdapat kendala dalam koordinasi antara Bappeda dan Dinas Pendidikan, sehingga diperlukan perhatian khusus, kebijakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta data dan informasi yang detail untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan pendidikan di daerah tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"FUNGSI KOORDINASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI RUAS JALAN DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA."**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas, Adapun permasalahan yang dapat teridentifikasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.2.1. Kerusakan Jalan di Kabupaten Kayong Utara khususnya di Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir, menghambat mobilitas dan ekonomi lokal.

1.2.2. Koordinasi yang Belum Optimal, sehingga Perlu peningkatan koordinasi antara BAPPEDA dan Dinas PUTR untuk memastikan sinkronisasi antara rencana dan implementasi pembangunan.

1.2.3. Infrastruktur jalan yang buruk memperlambat pertumbuhan ekonomi, menuntut perencanaan yang lebih efektif dan terkoordinasi.

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan manfaat dengan membatasi lingkup objek penelitian, tujuannya adalah agar peneliti tidak terlalu banyak terjebak dalam jumlah data lapangan yang terlalu besar. Fokus penelitian ini lebih berorientasi pada tingkat kebaruan informasi yang diharapkan dapat diperoleh dari situasi sosial dan ekonomi yang ada. Pendekatan ini bertujuan untuk mempersempit studi kualitatif serta membantu dalam proses seleksi data yang relevan dan tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih dipengaruhi oleh tingkat kepentingan, urgensi, dan keandalan permasalahan yang ingin dipecahkan (Sugiyono, 2017, 207). Penelitian ini difokuskan pada fungsi koordinasi yang dilakukan antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan pihak terkait dalam

perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kayong Utara khususnya di Desa Rantau Pangjang Kecamatan Simpang Hilir.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana fungsi koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini antaralain adalah mengkaji dan mengetahui fungsi koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan penelitian lebih lanjut bagi berbagai pihak dan untuk menambah wawasan berfikir dan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi informasi bagi Masyarakat tentang pentingnya Pembangunan.

2. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi masukkan bagi badan perencanaan pembangunan dan dinas pekerjaan umum untuk meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan infrastruktur jalan.

3. Bagi Lembaga Universitas Tanjungpura

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan fakuktas ilmu sosial dan politik khususnya ilmu pemerintahan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

4. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan pengalaman dan wawasan untuk menerapkan teori maupun praktik di lapangan.